

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan melekat terhadap kedisiplinan pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya langsung mempunyai andil besar dalam terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (*Good Governance and Clean Governance*).

Pelaksanaan pengawasan diantaranya:

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung sebagai instansi pemerintah mampu melaksanakan pengawasan secara intern dan merespon secara signifikan berbagai macam permasalahan dan perubahan yang terjadi, baik politik, ekonomi, maupun sosial melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan menyeluruh.
- b. Tindak lanjut hasil pengawasan sangat diperlukan dalam rangka memperbaiki manajemen pemerintah antara lain aspek kedisiplinan dan tata laksana sumber daya manusia aparatur negara, aspek kelembagaan serta penilaian kerja di setiap unitnya sehingga, tidak akan ada lagi kesalahan yang sama. Dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dijadikan salah satu dasar penilaian serta bahan pertimbangan dalam promosi jabatan.

- c. Tuntutan dunia modern terhadap suatu institusi mendorong secara tidak langsung adanya peningkatan kedisiplinan kerja bagi pegawai. Selain itu diimbangi dengan peningkatan pengawasan yang juga untuk menciptakan *Good Governance* dan *Clean Governance*. Sehingga akan mendorong untuk menciptakan disiplin kerja yang optimal.
2. Hambatan yang terjadi dalam pengawasan melekat terhadap kedisiplinan PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung diantaranya:
 - a. Hambatan Hukum
 - 1) Tidak semua PNS memahami mengenai aturan disiplin pegawai negeri, melainkan hanya beberapa dari isi peraturan yang diterapkan.
 - 2) Kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh pimpinan dalam pelaksanaan pengawasan melekat.

Pimpinan harus memberikan sanksi atau tindakan secara tegas bilamana seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran disiplin dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan *shock therapy* agar PNS yang lain tidak *meniru* atau melakukannya. Dan juga agar tidak melakukan pelanggaran disiplin yang hukumannya lebih berat lagi. Oleh karena itu setiap pimpinan wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - 3) Lunturnya Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil

Penegakkan disiplin di lingkungan Pegawai Negeri Sipil sangatlah penting, karena suatu lingkungan tanpa disiplin akan terjadi kekacauan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Sedangkan hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin PNS.

b. Hambatan Non Hukum

- 1) Penempatan pimpinan yang kurang tepat sehingga atasan tidak mengetahui kedisiplinan bawahannya.
- 2) Hasil pengawasan tidak segera ditindaklanjuti dan hanya berakhir sebagai laporan tahunan.
- 3) Minimnya kesadaran disetiap individu PNS untuk meningkatkan disiplin kerjanya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Karena kurang adanya pemahaman tentang pemberlakuan

peraturan disiplin kerja yang harus dilaksanakan dan dipatuhi seluruh PNS.

- 4) Masih adanya rasa solidaritas dan tidak adanya jarak diantara pimpinan-pimpinan maupun pengawas dengan pegawai sehingga menimbulkan celah bagi mereka untuk tidak disiplin.

Solusinya yaitu dengan adanya sanksi/tindakan secara tegas bilamana seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang tujuan untuk memberikan efek jera dan *shock therapy* agar PNS yang lain tidak meniru atau melakukannya. Dan juga agar tidak melakukan pelanggaran yang hukumannya lebih berat lagi.

B. Saran

Masyarakat yang semakin cerdas menuntut kepada pemerintah agar menerapkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kedisiplinan pegawai terutama di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung untuk terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pertanggungjawaban dalam kinerja, maka perlu adanya:

- 1) Pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan terhadap bawahannya di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung pada kedisiplinan PNS sehingga harus profesional dalam melakukan pengawasan dan menggunakan sifat yang efisien dan akuntabel. Dengan demikian hasil pengawasan harus sesuai dengan kenyataan apa adanya dan tanpa mengada-ada.

- 2) Pelaksanaan pengawasan terhadap kedisiplinan dan tindak lanjut hasilnya dapat membawa dampak terhadap perbaikan manajemen sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung. Maka diperlukan adanya penyampaian hasil pengawasan yang relevan dan apa adanya sesuai dengan perilaku PNS tersebut.
- 3) Pengawasan pada disiplin kerja PNS harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk memenuhi indikator disiplin kerja yang optimal.